

# INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI KABUPATEN BARITO KUALA

**Novita Sari<sup>1</sup>, Tomy Oktavianor<sup>2</sup>**  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lambung Mangkurat  
Email: [Novita2329@gmail.com](mailto:Novita2329@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to describe the villages in Barito Kuala Regency based on the Building Village Index (IDM) and find out the direction of policies related to disadvantaged villages in Barito Kuala Regency. This study uses Mix Methodes approach, with the type of research being explanatory sequential. Based on data from the Build Village Index Recapitulation from the Barito Kuala Regency Community and Village Empowerment Office in 2017, it shows that the percentage of underdeveloped villages in Barito Kuala Regency reaches 64% or reaches 126 villages, so it must be a big concern for the local government. Determining the status of the village uses the Building Village Index by the Ministry of Village as a measure consisting of 3 aspects, namely the Social Resilience Index (IKS), the Economic Resilience Index (IKE) and the Environmental Resilience Index (IKL). In reducing the number of underdeveloped villages in Barito Kuala Regency, the government must pay attention to these three aspects to take a policy that can reduce the number of underdeveloped villages. The results showed that the Economic Resilience village was the index with the lowest value, followed by the Environmental Resilience Index and the Social Resilience Index. Based on this, the local government plan two policies, namely the first priority for village fund use which includes two things, namely increasing the economic activities of rural communities and improving the quality of life of rural communities, and the second through Integrated Village Surgery programs.*

**Keywords:** *Building Village Index, Underdeveloped Villages, Policy*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan desa-desa di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Building Village Index (IDM) dan mengetahui arah kebijakan terkait desa tertinggal di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mix Methodes, dengan jenis penelitiannya adalah Explanatory Sequential. Berdasarkan data Rekapitulasi Indeks Desa Bangun dari Dinas Kemasyarakatan dan Desa Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase desa tertinggal di Kabupaten Barito Kuala mencapai 64% atau mencapai 126 desa, sehingga harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah. Penetapan status desa menggunakan Indeks Bangunan Desa oleh Kementerian Desa sebagai ukuran yang terdiri dari 3 aspek yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan

Lingkungan (IKL). Dalam mengurangi jumlah desa tertinggal di Kabupaten Barito Kuala, pemerintah harus memperhatikan ketiga aspek tersebut untuk mengambil kebijakan yang dapat mengurangi jumlah desa tertinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ketahanan Ekonomi merupakan indeks dengan nilai terendah, diikuti oleh Indeks Ketahanan Lingkungan dan Indeks Ketahanan Sosial. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah merencanakan dua kebijakan yaitu prioritas pertama penggunaan dana desa yang meliputi dua hal yaitu peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, dan yang kedua melalui program Bedah Desa Terpadu

Kata Kunci: Membangun Indeks Desa, Desa Tertinggal, Kebijakan

## PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat (Kementrian Desa, PDDT, 2015).

Data dari Badan Pusat statistik menunjukan bahwa wilayah desa adalah wilayah dengan persentase jumlah penduduk miskin yang tinggal dengan jumlah yang cukup banyak, untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan pembangunan desa. Pembangunan desa dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang terjadi pada wilayah desa dan kota akibat dari adanya pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada kota. (Oktaviana dan Bachruddin, 2017).

Pembangunan di desa merupakan strategi dari pemerintah dalam menciptakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Sebagaimana yang diamanatkan dalam

Nawacita pada butir yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” yang sekaligus menjadi strategi pembangunan di dalam RPJMN 2015-2019.

Guna meningkatkan sistematika pengukuran pembangunan desa tersebut maka Kementerian Desa (2015) telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Menteri tentang Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi (Kementrian Desa, 2015).

Berdasarkan hasil rekapitulasi IDM pada tahun 2017 di Kabupaten Barito Kuala dapat diketahui sebagai berikut:

### Rekapitulasi IDM di Kabupaten Barito Kuala, 2017

| Status Desa       | Jumlah Desa | Persentase  |
|-------------------|-------------|-------------|
| Mandiri           | 0           | 0%          |
| Maju              | 4           | 2%          |
| Berkembang        | 54          | 27%         |
| Tertinggal        | 126         | 64%         |
| Sangat Tertinggal | 11          | 7%          |
| <b>Total</b>      | <b>195</b>  | <b>100%</b> |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, 2017.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa status desa tertinggal merupakan status desa terbanyak, untuk mengetahui penyebab ketertinggalan desa-desa tersebut maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana deskripsi desa-desa dan bagaimana kontribusi ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap desa tertinggal yang ada di kabupaten Barito Kuala sehingga selanjutnya dapat diketahui kebijakan apa yang cocok dalam mengatasi masalah tersebut.

### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana deskripsi desa-desa di Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana arah kebijakan pembangunan pada desa-desa tertinggal di Kabupaten Barito Kuala?

### KERANGKA TEORI

#### Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks yang disusun dengan tiga komponen terbentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. IDM diharapkan mampu mencakup semua bidang kehidupan desa yang memberi kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan karakteristik yang dimilikinya. IDM membagi desa kedalam lima status dan ditentukan berdasarkan nilai IDM yang diperoleh dengan rentang nilai sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal:  $< 0,491$
2. Desa Tertinggal:  $> 0,491$  dan  $< 0,599$
3. Desa Berkembang:  $> 0,599$  dan  $< 0,707$
4. Desa Maju:  $> 0,707$  dan  $< 0,815$
5. Desa Mandiri:  $> 0,815$

### METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran (*Mixed methods*) dengan tipe penelitian *sekuensial eksplanatori*. Teknik Analisis

Data yang digunakan meliputi teknik analisis data kuantitatif (analisis kluster dan diskriminan) dan teknik analisis data kualitatif (analisis tematik).

### HASIL PENELITIAN

#### Deskripsi desa-desa di Kabupaten Barito Kuala

**Tabel Statistik Deskriptif**

| Variabel | Nilai Terendah | Nilai Tertinggi | Nilai Rata-rata |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| IKS      | 0,4457         | 0,7829          | 0,6457          |
| IKE      | 0,2500         | 0,7500          | 0,4556          |
| IKL      | 0,3333         | 1,0000          | 0,6280          |
| IDM      | 0,4300         | 0,7649          | 0,5703          |

Sumber: Hasil Output SPSS (terlampir)

Berdasarkan Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017, dapat diketahui bahwa Ketahanan Sosial pada desa-desa di Kab. Batola saat ini sudah cukup baik, terlihat dari nilai rata-rata Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 0,6457. Ketahanan Ekonomi pada desa-desa di Kab. Batola saat ini belum bisa dikatakan baik, karena jika dilihat dari nilai rata-rata Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) hanya sebesar 0,4556. Ketahanan Lingkungan pada desa-desa di Kab. Batola saat ini sudah cukup baik, terlihat dari nilai rata-rata Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebesar 0,6280.

#### Pengklasteran Desa-desa di Kabupaten Barito Kuala

Pengklasteran desa-desa ini dilakukan menggunakan analisis kluster dengan bantuan program SPSS versi 20, dimana peneliti mengelompokkan desa-desa tersebut dalam 6 kluster, yaitu:

1. Anggota Kluster 1

Jumlah desa pada kluster 1 sebanyak 14 desa yang terdiri dari 10 desa tertinggal dan 4 desa sangat tertinggal, adapun karakteristik yang

sama dari tiap desa-desa tersebut dapat dilihat dari masing-masing Indeks dari seluruh desa yang ada pada anggota klaster 1.

## 2. Anggota Klaster 2

Jumlah desa pada klaster 2 adalah sebanyak 136 desa yang terdiri dari 1 desa sangat tertinggal, 99 desa tertinggal dan 36 desa berkembang, adapun karakteristik yang sama dari tiap desa-desa tersebut dapat dilihat dari masing-masing Indeks dari seluruh desa yang ada pada anggota klaster.

## 3. Anggota Klaster 3

Jumlah desa pada klaster 3 sebanyak 22 desa terdiri dari 16 desa tertinggal dan 6 desa sangat tertinggal, adapun karakteristik yang sama dari tiap desa-desa tersebut dapat dilihat dari masing-masing Indeks dari seluruh desa yang ada pada anggota klaster.

## 4. Anggota Klaster 4

Jumlah desa pada klaster 4 hanya 1 desa dengan status desa Maju.

## 5. Anggota Klaster 5

Jumlah desa pada klaster 5 adalah sebanyak 17 desa, terdiri dari 14 desa berkembang dan 3 desa maju, adapun karakteristik yang sama dari tiap desa-desa tersebut dapat dilihat dari masing-masing indeks dari seluruh desa yang ada pada anggota klaster 5.

## 6. Anggota Klaster 6

Jumlah desa pada klaster 6 adalah sebanyak 5 desa, terdiri dari 1 desa tertinggal dan 4 desa berkembang, adapun karakteristik yang sama dari tiap desa-desa tersebut dapat dilihat dari masing-masing indeks dari seluruh desa yang ada pada anggota klaster 6.

## Diskriminan Desa-desa di Kabupaten Barito Kuala

Diskriminan desa-desa ini dilakukan menggunakan analisis diskriminan dengan

menggunakan program SPSS versi 20, dan hasil analisis tersebut di uraikan sebagai berikut:

**Tabel Kelompok Statistik**

| Status Desa       | IKS    | IKE    | IKL    |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Maju              | 0,6908 | 0,6791 | 0,8000 |
| Berkembang        | 0,6769 | 0,5554 | 0,6788 |
| Tertinggal        | 0,6349 | 0,4134 | 0,6116 |
| Sangat Tertinggal | 0,5998 | 0,3682 | 0,5042 |

Sumber: Hasil Output SPSS

- Pada status desa Sangat Tertinggal, nilai rata-rata IKS dari tiap-tiap desa adalah 0,5998, nilai rata-rata jumlah IKS pada status desa Tertinggal adalah 0,6349, nilai rata-rata jumlah IKS pada status desa Berkembang adalah 0,6769 dan nilai rata-rata jumlah IKS pada status desa Maju adalah 0,6908
- Pada status desa Sangat Tertinggal, nilai rata-rata jumlah IKE dari tiap-tiap desa adalah 0,3682, nilai rata-rata jumlah IKE pada status desa Tertinggal adalah 0,4134, nilai rata-rata jumlah IKE pada status desa Berkembang adalah 0,5554 dan nilai rata-rata jumlah IKE pada status desa Maju adalah 0,6791.
- Pada status desa Sangat Tertinggal, nilai rata-rata jumlah IKL dari tiap-tiap desa adalah 0,5042, nilai rata-rata jumlah IKL pada status desa Tertinggal adalah 0,6116, nilai rata-rata jumlah IKL pada status desa Berkembang adalah 0,6788 dan nilai rata-rata jumlah IKL pada status desa Maju adalah 0,8000.

## Arah Kebijakan Pembangunan Desa-desa tertinggal di Kabupaten Barito Kuala

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi desa tertinggal adalah melalui prioritas penggunaan Dana Desa yang meliputi dua hal yaitu: 1) mendukung kegiatan ekonomi masyarakat

desa yang meliputi: jalan desa, jembatan, pasar desa, bangunan BUMDesa, tambatan perahu, balai pelatihan, irigasi dan saluran permukiman dan gorong-gorong. 2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang meliputi: siring penahan tanah, perpustakaan desa, MCK, bedah rumah, ambulance desa, PAUD/TPA, posyandu dan air bersih dari sumur bor. Kebijakan yang lain yaitu Program Bedah Kampung Terintegrasi.

## PEMBAHASAN

### Pengklasteran desa-desa di Kabupaten Barito Kuala

#### 1. Klaster 1

Karakteristik yang sama pada klaster 1 dapat dilihat dari nilai yang diperoleh dari masing-masing indeks yaitu, untuk Ketahanan Sosial belum cukup baik. Ketahanan Ekonomi juga belum baik dan Ketahanan Lingkungan yang sudah cukup baik. Secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan nilai rata-rata IDM maka kondisi ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada desa-desa tersebut bisa dikatakan belum baik karena nilai rata-rata IDM yang diperoleh hanya sebesar 0,4959.

#### 2. Klaster 2

Karakteristik yang sama pada klaster 2 yaitu, untuk ketahanan sosial sudah cukup baik. Ketahanan ekonomi belum baik dan Ketahanan Lingkungan cukup baik. Secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan nilai rata-rata IDM maka kondisi ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada desa-desa tersebut sudah bisa dikatakan cukup baik yaitu sebesar 0,5697.

#### 3. Klaster 3

Pada klaster 3 karakteristik yang sama yang untuk Ketahanan Sosial sudah cukup baik. Ketahanan Ekonomi belum baik dan Ketahanan Lingkungan belum baik. Secara keseluruhan untuk keadaan ketahanan sosial, ekonomi dan

lingkungan pada desa-desa tersebut bisa dikatakan belum baik karena nilai rata-rata IDM hanya sebesar 0,5076.

#### 4. Klaster 4

Pada klaster 4 hanya 1 desa dengan status desa Maju, dengan nilai IKS sebesar 0,6114, IKE sebesar 0,7500, IKL sebesar 0,9333 dan IDM 0,7649. Artinya tidak ada satupun desa di Kab. Barito Kuala yang mempunyai karakteristik yang sama dengan desa Porwosari I.

#### 5. Klaster 5

Pada klaster 5 karakteristik yang sama yang dimiliki tiap-tiap desa adalah untuk Ketahanan Sosial sudah baik. Ketahanan Ekonomi sudah cukup baik dan Ketahanan lingkungan sudah baik. Secara keseluruhan untuk keadaan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada desa-desa tersebut bisa dikatakan sudah cukup baik karena nilai rata-rata IDM sebesar 0,6779.

#### 6. Klaster 6

Pada klaster 6 karakteristik yang sama dari tiap-tiap desa tersebut yaitu, untuk Ketahanan Sosial sudah cukup baik. Ketahanan Ekonomi belum baik dan Ketahanan Lingkungan sudah sangat baik. Secara keseluruhan untuk keadaan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada desa-desa tersebut bisa dikatakan sudah cukup baik karena nilai rata-rata IDM sebesar 0,6659.

### Diskriminan Desa-desa di Kabupaten Barito Kuala

1. Pada Status desa Sangat Tertinggal, nilai rata-rata IKS sudah cukup baik, artinya ketahanan sosial tersebut sudah cukup baik. Nilai rata-rata IKE masih belum baik, artinya ketahanan ekonomi pada desa tersebut belum baik dan nilai rata-rata IKL yang masih belum baik, artinya ketahanan lingkungan pada desa tersebut juga belum baik.

2. Pada status desa Tertinggal nilai rata-rata IKS dan IKL sudah cukup baik, namun IKE belum baik, artinya dua ketahanan (sosial dan lingkungan) sudah cukup baik dan untuk ketahanan ekonomi belum baik.
3. Pada status desa Berkembang memiliki nilai rata-rata indeks yang kurang lebih sama dengan desa tertinggal, namun keadaannya lebih baik dari pada desa tertinggal.
4. Pada status desa Maju nilai rata-rata dari masing-masing indeks menunjukkan bahwa ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan sudah baik.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa keempat status desa tersebut cukup terlihat perbedaan dari tiap ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada masing-masing status desa tersebut. Namun pada tiga status desa (Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Berkembang) sama-sama masih meraih nilai Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang rendah dan hanya desa maju yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang sudah baik.

#### **Arah Kebijakan Pembangunan Desa-desa tertinggal di Kabupaten Barito Kuala**

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut meliputi: 1) mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa yang meliputi: jalan desa, jembatan, pasar desa, bangunan BUMDesa, Tambatan Perahu, Balai Pelatihan, irigasi dan saluran permukiman dan gorong-gorong. 2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang meliputi: siring penahan tanah, perpustakaan desa, MCK, bedah rumah, ambulance desa, PAUD/TPA, posyandu dan air bersih dari sumur bor. Prioritas tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi pada desa-desa tersebut karena rata-rata desa di Kab. Batola memperoleh nilai IKE yang rendah. Selain itu, kebijakan tersebut

sesuai penjelasan Permendesa Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang diharapkan dapat membangun dan memberdayakan masyarakat desa dan mendorong desa tertinggal agar menjadi desa yang mandiri.

2. Bedah Kampung terintegrasi adalah program yang disiapkan pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah desa tertinggal di Kab. Batola Program ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dimana terdapat program prioritas Bedah Kampung Terintegrasi yang merupakan salah satu perwujudan Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yaitu “Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”.

#### **KESIMPULAN**

1. Deskripsi desa-desa di Kabupaten Barito Kuala menggambarkan bahwa dari ketiga Indeks Ketahanan (sosial, ekonomi dan lingkungan), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) lah yang paling rendah, disusul Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS).
2. Dari ke 4 status desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala juga terlihat bahwa Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) pada desa tertinggal merupakan Indeks yang paling rendah dibandingkan ke dua indeks lainnya.
3. Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah desa yang tertinggal terkait dengan dua hal yaitu: Pertama, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dimana dalam prioritas tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa yang

menjadi bagian dari indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang merupakan bagian dari indeks ketahanan sosial (IKS). Kedua, Bedah Kampung Tertintegrasi.

## SARAN

1. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) merupakan indeks yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah, mengingat indeks tersebut adalah indeks yang paling rendah nilainya dibandingkan ke dua indeks yang lainnya.
2. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang diperoleh Kab. Batola sudah dapat dikatakan cukup baik, mengingat nilai yang diperoleh sudah melebihi nilai rata-rata nasional, namun dalam menciptakan desa-desa yang lebih baik di Kabupaten Barito Kuala maka harus terus meningkatkan nilai IDM dari tahun ke tahun
3. Terkait Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam mengurangi desa-desa di Kabupaten Barito Kuala maka juga harus memperhatikan semua aspek (IKS, IKE dan IKL). Karena tiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk Indeks Desa Membangun (IDM).

## DAFTAR REFERENSI

### Buku-buku

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2018*. Barito Kuala: Cv Karya Bintang Muslim.
- Eko, Sutoro. *et al.* (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, Kementerian Desa, PDTT. (2015). *Buku Data dan Informasi Penyiapan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta
- Rahmah, Y. and Hamzah, A. (2016) *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka.
- Jurnal-jurnal:**
- Oktaviana & Bachruddin. (2017). Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi.
- Setyobakti, H. M. (2017). Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis indeks desa membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir kabupaten malang. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*.
- Undang-Undang:**
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang "Indeks Desa Membangun".
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa